**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan bisnis di Indonesia secara khusus dan di dunia secara umum telah mengalami kemajuan yang pesat. Indonesia saat ini telah memasuki era globalisasi, hal itu ditandai dengan berkembangnya dunia usaha. Perkembangan dunia usaha ini menyebabkan makin tajamnya persaingan, oleh sebab itu perusahaan harus mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya sekaligus berkembang sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Perkembangan dunia bisnis berjalan seiring dengan perkembangan perpajakan bagi perusahaan. Pajak dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara dalam pembangunan Nasional, tanpa adanya imbalan secara langsung yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Perpajakan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Dengan semakin berkembangnya kondisi usaha dan bisnis baik ditingkat nasional maupun internasional, maka penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri juga meningkat. Penerimaan APBN terbesar dari pajak penghasilan PPhnon migas tahun 2013 yaitu Rp 271,80 Triliun yang memiliki kenaikan 6,28% dibandingkan dengan APBN PPh non migas tahun 2012 yaitu Rp 191,95 Triliun yang hanya mencapai kenaikan 5,5%. Badan atau perusahaan merupakan subyek pajak dalam negeri dimana wajib pajak badan ini  merupakan penyumbang terbesar dari sektor pajak penghasilan badan setelah dari sektor migas. Dengan dasar inilah pemerintah selalu mengadakan penyempurnaandalam bidang perpajakan, yaitu dengan mengadakan penambahan Peraturan Pemerintah (PP)untuk pajak penghasilan (PPh) di Indonesia.

Pajak penghasilan dikategorikan sebagai pajak pusat, tetapi di tinjau dari sifatnyadikategorikan sebagai pajak subjektif, dengan pengertian bahwa pungutan pajak penghasilan berpangkal atau mendasarkan pada subyek pajaknya. Melaksanakan ketentuan pajak penghasilan merupakan kontribusi aktif wajib pajak dalam hal ini pengusaha untuk turut serta secara aktif dalam pembangunan negara.

Undang- undang pajak penghasilan ini dilandasi falsafah pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjungjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan sebagai sarana peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Undang-undang pajak penghasilan di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan tersebut disesuaikan dengan kondisi atau keadaan perekonomian negara serta warga negaranya. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya:

1. Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau disebut juga Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1984 karena berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984.
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atau disebut juga Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1995 karena berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995.
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atau disebut juga Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2001 karena berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001.
4. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang disebut UU PPh 2008 tentang Pajak Penghasilan karena berlaku sejak tanggal 1 September 2009.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terbaru pada tahun 2013, yaitu PP No.46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2013 oleh Presiden Bambang Yudhoyono dan di undangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin pada tanggal 13 Juni 2013 berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013 menurut pasal 11 PP No. 46 Tahun 2013.

Sebelum dikeluarkannya PP No. 46 Tahun 2013, perusahaan menggunakan tarif pajak pasal 17 ayat (1) huruf *b* UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang berbunyi “Tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% “. Pasal tersebut diperjelas dalam pasal 17 ayat (2a) yang berbunyi “Tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun 2010.

Perusahaan dalam menjalankan usahanya mau tidak mau akan terkait dengan masalah perpajakan, karena setiap badan usaha pasti memiliki NPWP, oleh karena itu berkewajiban untuk melaksanakan aturan perpajakan yang berlaku saat ini. Kewajiban wajib pajak sesuai dengan konsep *self assesment* adalah :

1. Menghitung sendiri besaran pajak terhutangnya.
2. Menyetor sendiri pajaknya melalui kantor pos atau bank-bank persepsi, dan
3. Melapor dengan surat pemberitahuan ke kantor pelayanan pajak.

Perusahaan sehubungan dengan perpajakan harus benar-benar merencanakan perpajakannya karena sedikit banyak akan berpengaruh terhadap laba bersih yang diperoleh perusahaan. Peraturan yang berubah-ubah juga akan berpengaruh terhadap operasional terutama keuangan perusahaan. Terutama bagi perusahaan kategori usaha kecil seringkali tidak memiliki pengetahuan mengenai perpajakan.

Pelaksanaannya, banyak pengusaha yang merasa kesulitan untuk menjalankan atau melaksanakan kewajiban perpajakannya, dikarenakan perusahaan harus membuat laporan keuangan sehingga benar-benar harus mengerti aturan perpajakan dan akuntansi sehingga mampu membuat laporan keuangan dan menentukan besaran PPhnya.

Atas dasar hal tersebut pemerintah merumuskan Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud maka Pemerintah terus melakukan penambahan PP untuk mengakomodasi perkembangan usaha dan lingkungan bisnis yang relevan tentang Pajak Penghasilan.PP No. 46 Tahun 2013 yang efektif tanggal 1 Juli 2013 berisi tentang penghasilan bruto dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 1% dari peredaran bruto (omzet) setiap bulannya yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 (empat miliyar delapan ratus juta rupiah) dalam satu (1) Tahun pajak. Dengan usaha meliputi usaha dagang, industri, dan jasa seperti toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan perhitungan, peyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.Peraturan Pemerintah (PP) ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara, khususnya pajak penghasilan badan.

CV. Cihanjuang Inti Teknik (CINTEK) adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan Turbin sebagai Penggerak Listrik Tenaga *Micro Hydro* (PLTMH) yang beralamat di jalan Cihanjuang No.204 Cimahi Utara 40513 Kota Cimahi Jawa Barat Indonesia. Pengembangan dari teknologi *Mikrohidro* inilah timbul ide untuk mengelola industri agribisnis dengan bahan dasar yang ada di sekitar kita dan produk makanan instan tradisional Jawa Barat, maka dibuatlah "Bandrek" dan "Bajigur" dengan merk dagang "Hanjuang" dalam bentuk serbuk yang siap seduh, yang bermula dari proyek percontohan teknologi pasca panen yang dikemas secara *modern*. Ada 9 (Sembilan) jenis produk yang telah dikembangkan, diantaranya:Bandrek, Kopi Bandrek, Enteh Bandrek, Bandrek Spesial, Coklat Bandrek, Bajigur, Kopi Bajigur, Beas Cikur dan Sakoteng.Setiap tahun CV. CINTEK berkewajiban membayar pajak penghasilan badan usahanya kepada negara.CV. CINTEK adalah perusahaan yang termasuk pada kriteria PP No. 46 Tahun 2013 karena omzet dari CV.CINTEK tahun 2013 adalah 664.859.888 pertahun. Dalam hal perpajakan, CV. CINTEK telah berusaha melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil penjajagan diketahui permasalahan yang muncul sehubungan dengan perhitungan PPhbadan adalah perusahaan sudah menghitung seluruh bulan pada tahun 2011 sampai 2013 dengan tarif pajak lama yaitu tarif pajak pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 sedangkan mulai Tanggal 1 Juli 2013 sudah harus menggunakan PP No.46 Tahun 2013. Hal tersebut diduga oleh adanya peraturan baru mengenai tarif PPh badan sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013 yang berdasarkan pada 1% dari omzet bulanan dalam 1 (satu) tahun sedangkan menurut pasal 17 UU No. 36 tahun 2008 untuk tarif PPh badan sebesar 25% dari penghasilan *netto.*Contoh : CV CINTEK telah membuat laporan keuangan setahun penuh dan menghitung PPh berdasarkan pasal 17, dan berdasarkan ketentuannya mulai 1 juli 2013 pengenaan pada PP No 46 Tahun 2013 dimana perusahaan cukup mencatat omzet bulanan dan melaporkan PPh bulanan dan bersifat FINAL.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang masalah ini dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perbandingan Pengenaan PPh Badan Berdasarkan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 Undang-Undang Periode 2011-2013 No. 36 Tahun 2008 dengan PP No. 46 Tahun 2013 Pada CV. Cihanjuang Inti Teknik CINTEK Periode Tahun 2011-2013”.**

1. **Identifikasi dan Perumusan Masalah**
2. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengenaan Tarif Pajak Penghasilan Badan berdasarkanPasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 pada CV. CINTEK Cimahitahun 2011-2013?
2. Bagaimana pengenaan Tarif Pajak Penghasilan Badan berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 pada CV. CINTEKCimahi tahun 2011-2013?
3. Perbandingan pengenaan tarif pajak penghasilan badan berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif pajak penghasilan badan pasal 17 pada CV. CINTEK Cimahi pada tahun 2011-2013?
4. Bagaimana dampak perubahan pengenaan tarif pajak penghasilan badan dari Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 ke tarif pajak berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap CV. CINTEK Cimahi?
5. **Rumusan Masalah**

Berdasarkanidentifikasimasalah yang telah dipaparkan, makapenelitidapat merumuskanpermasalahan. Dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) badan berdasarkan tarif pajak pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 dan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap CV. CINTEK pada tahun 2011, 2012 dan 2013.

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengenaan tarif pajak penghasilan badan berdasarkan pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 pada CV. CINTEK Cimahi tahun 2011-2013.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengenaan tarif pajak penghasilan badan berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013pada CV. CINTEK Cimahi tahun 2011-2013.
3. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan pengenaan tarif pajak penghasilan badan berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif pajak penghasilan badan pasal 17 pada CV. CINTEK Cimahi pada tahun 2011- 2013.
4. Untuk mengetahui bagaimana dampak perubahan pengenaan tarif pajak penghasilan badan dari Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 ke tarif pajak berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap CV. CINTEK Cimahi.
5. **Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis ini merupakan suatu pemahaman secara nyata mengenai teori yang diperoleh di perkuliahan dengan aktivitas yang ada di lapangan, khususnya mengenai Perbandingan pengenaan PPhbadan berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan UU Nomor 36 Tahun 2008 Tarif pajak pasal 17.

1. **Kegunaan Praktis**

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti, diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis bagi pihak :

1. Bagi peneliti

Untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan sehingga peneliti mendapat gambaran nyata dari teori yang didapat di bangku perkuliahan dibandingkan dengan kenyataan praktek yang ada sehingga dapat memberikan ilmu tambahan terutama pengenaan Pajak dan mengetahui peraturannya khusus mengenai PPh badan.

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan penelitian tentang pengenaan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang baru sehingga CV. CINTEK yang termasuk kriteria dapat membayar tarif sesuai peraturan baru.

1. Bagi Pembaca

Dengan memperoleh data dan informasi yang telah disusun diharapkan dapat dijadikan bahan kajian untuk lebih memahami bagaimana Perbandingan pengenaan PPh badan berdasarkan tarif Nomor 46 Tahun 2013 dan UU Nomor 36 Tahun 2008 tarif pajak pasal 17 pada CV. CINTEK.

1. **Kerangka Pemikiran**

Pajak merupakan pemungutan yang dilakukan secara paksa oleh pemerintah kepada warga negaranya selaku wajib pajak berdasarkan undang-undang perpajakan. Salah satu pajak yang dioptimalkan pemungutannya oleh pemerintah yaitu Pajak Penghasilan. Subyek dari pajak penghasilan sendiri diantaranya perorangan, perusahaan, koperasi, warisan, dan badan hukum lainnya.

Pengertian pajak menurut para pakar perpajakan mengemukakannya berbeda satu sama lain dari waktu ke waktu, meskipun demikian pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Pengertian pajak, yang satunya dikemukakan oleh **P.J.A. Adriani** yang telah diterjemahkan oleh **R. Santoso Brotodiharjo** yang dirangkum oleh **Waluyo** berbunyi sebagai berikut:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. (2011: 2)

Menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 atau UU KUP tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

Wajib Pajak Badan adalah meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma (Fa), kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (BUT).

Menurut **Y. B. Sigit Hutomo (2009:2)** Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP (Ketentuan Umum Perpajakan).

Menurut **Y. B. Sigit Hutomo(2009: 15)**Subyek pajak adalah pihak yang mempunyai kewajiban-kewajiban subyektif atau terhadap siapa saja pajak akan ditagih. Subyek dari Pajak Penghasilan PPh badan yaitu:

1. Wajib Pajak Badan dalam negeri, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
2. Wajib Pajak Badan luar negeri, yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, dan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia.

 Menurut **Y. B. Sigit Hutomo (2009: 29)**obyek pajak PPh Badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 mengenai tarif pajak:

Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.

Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

UU No. 36 Tahun 2008 atau UU PPh 2008 pemerintah mengenakan pajak penghasilan dengan sifat atau tatacara yang berbeda dengan ketentuan umum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pada buku **Y. B. Sigit Hutomo (2009:3)** Pertimbangan-pertimbangan tersebut (**Dudi Wahyudi**, 2008a) adalah:

1. Perlu adanya dorongan dalam rangka pengembangan investasi dan tabungan masyarakat.
2. Kesederhanaan dalam pemungutan pajak
3. Berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak.
4. Pemerataan dalam pengenaan pajaknya.
5. Memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Sedangkan untuk ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan maksud dan tujuan:

1. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan;
2. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi;
3. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi;
4. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.
5. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
6. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat;
7. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Obyek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun Pajak.

Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/*counter/outlet* atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet). Objek Pajak yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan PP tersebut;
2. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)) yang seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri;
3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

Subjek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013, adalah:

1. Orang Pribadi;
2. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT)yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Penghasilan bruto yang tidak melebihi Rp 4,8 Miliar ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dari seluruh usaha, termasukdariusahacabang, tidak termasuk penghasilan bruto dari:

1. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri;
3. Usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri, misalnya usaha jasa konstruksi;
4. Dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Subjek pajak yang tidak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah:

1. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya.
2. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp4,8 miliar.
3. **Lokasi dan Lamanya Penelitian.**
4. **Lokasi Penelitian**

Penyusunan usulan penelitian, peneliti melakukan penelitian pada Perusahaan CV. Cihanjuang Inti Teknik (CINTEK) yang berlokasi di Jalan Cihanjuang No. 204 Cimahi Jawa Barat.

1. **Lamanya Penelitian**

Lamanya penelitian yang dilakukan peneliti selama 6 bulan dimulai dari bulan Januari 2014sampai dengan bulan Juni 2014. Adapun perincian jadwal penelitiannya dijelaskan pada tabel berikut

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan** | **Tahun** | **2014** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Bulan** | **Januari** | | | | **Februari** | | | | **Maret** | | | | **April** | | | | **Mei** | | | | **Juni** | | | |
| **Minggu** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | **TAHAPAN PERSIAPAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. Penelitian Kepustakaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. Penjajakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. Pengajuan Judul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d. Perizinan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e. Pembuatan Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f. Seminar Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g. Perbaikan Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **TAHAPAN PENELITIAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. Observasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. Wawancara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **TAHAPAN PENYUSUNAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. Pengolahan Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. Analisis Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. Pembuatan Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **TAHAPAN PENGUJIAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. Seminar Draft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. Perbaikan Draft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. Sidang Skripsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Sumber : Pengolahan data 2014* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tabel 1.1**

**Jadwal Kegiatan Penelitian**